

## TANGGUNG JAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PILIH KARYAWAN DALAM PEMILU

**Raihan Rifky Imani**  
[raihanrifkyyy@gmail.com](mailto:raihanrifkyyy@gmail.com)  
Universitas 17 Agustus 1945

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu, dengan fokus pada tanggung jawab dan sanksi bagi pimpinan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan, buku hukum, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melibatkan literasi, telaah undang-undang, dan analisis bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Analisis Preskriptif dengan metode Konstruksi Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu memiliki dasar yang kuat dalam peraturan perundang-undangan, namun seringkali kurang diimplementasikan secara efektif oleh pimpinan perusahaan. Tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam memastikan hak pilih karyawan terlindungi meliputi penyediaan fasilitas untuk memberikan suara, memberikan informasi yang jelas tentang hak pilih, dan tidak melakukan tekanan atau ancaman terhadap karyawan terkait pilihan politik mereka. Sanksi bagi pimpinan perusahaan yang melanggar hak pilih karyawan dapat mencakup denda, pencabutan izin usaha, atau sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi tanggung jawab dan sanksi bagi pimpinan perusahaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak terkait dalam meningkatkan integritas proses pemilu dan menjaga hak pilih karyawan sebagai bagian dari demokrasi yang inklusif dan berkeadilan lebih efektif, efisien, dan adil, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat meningkat.

**Kata Kunci:** Hak Pilih, Ketenagakerjaan, Pemilu.

**Abstract:** This research aims to investigate the legal protection of employees' voting rights in elections, focusing on the responsibilities and sanctions for company leaders. The research method employed is normative legal research with legislative approach, case approach, and conceptual approach. Data were obtained from primary legal materials such as Article 27 Paragraph 1 of the 1945 Constitution, Law Number 7 of 2017, and Law Number 13 of 2003, as well as secondary legal materials including court decisions, legal books, journals, and relevant theses. Data collection techniques involved literature review, statutory analysis, and legal material analysis. The analytical technique used was the Prescriptive Analysis Technique with the Legal Construction method. The results of the research indicate that the legal protection of employees' voting rights in elections has a strong basis in legislation, but often lacks effective implementation by company leaders. The responsibilities of company leaders in ensuring the protection of employees' voting rights include providing facilities for voting, providing clear information about voting rights, and refraining from pressuring or threatening employees regarding their political choices. Sanctions for company leaders who violate employees' voting rights may include fines, revocation of business licenses, or other administrative sanctions in accordance with applicable regulations. This research contributes to strengthening understanding of the legal protection of employees' voting rights in elections and provides recommendations to enhance the implementation of responsibilities and sanctions for company leaders. It is hoped that the findings of this research will serve as a guide for policymakers, legal practitioners, and stakeholders in improving the integrity of the electoral process and safeguarding employees' voting rights as part of an inclusive and fair democracy.

**Keywords:** Voting Rights, Employment, Elections.

## **PENDAHULUAN**

Pemilu adalah fondasi yang penting bagi sistem demokrasi, di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang dianggap dapat mewakili kepentingan mereka. Dalam konteks demokrasi, pemilihan umum memegang peran kunci dalam menentukan perwakilan dan arah kebijakan negara. Namun, seringkali, hak-hak individu, termasuk hak pilih karyawan, dapat terhambat oleh berbagai faktor, termasuk intervensi atau kebijakan dari pihak ketiga, seperti pimpinan perusahaan. Hak pilih karyawan merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa demokrasi dapat berjalan dengan baik, bahkan di lingkungan kerja. Karyawan, sebagai bagian integral dari masyarakat, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum seperti warga negara lainnya. Hak ini tidak hanya merupakan hak individu, tetapi juga merupakan cara bagi para pekerja untuk mengekspresikan kehendak kolektif mereka terhadap arah kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi lingkungan kerja mereka. Namun, di tempat kerja, karyawan sering menghadapi tantangan untuk menjalankan hak politik mereka tanpa takut akan diskriminasi atau represi dari pihak perusahaan. Pimpinan perusahaan kadang-kadang dapat mencoba mempengaruhi atau membatasi hak pilih karyawan, entah melalui tekanan langsung atau kebijakan yang tidak mendukung partisipasi politik karyawan. Ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pemilihan umum di tempat kerja, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu sangat penting. Perlindungan ini tidak hanya merupakan upaya untuk melindungi hak individual, tetapi juga mendorong transparansi, keadilan, dan keberlanjutan demokrasi di lingkungan kerja. Dengan memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa tekanan atau diskriminasi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang demokratis dan inklusif. Penelitian mendalam terhadap tanggung jawab dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pimpinan perusahaan dalam konteks hak pilih karyawan menjadi penting. Karyawan harus merasa aman dan didukung untuk menjalankan hak politik mereka tanpa takut akan konsekuensi negatif terhadap pekerjaan mereka. Ini memerlukan kejelasan dalam hukum dan kebijakan perusahaan yang melindungi hak politik karyawan dan menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak tersebut. Perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan bukan hanya tentang melindungi hak individu, tetapi juga tentang memastikan integritas demokrasi di lingkungan kerja. Hal ini melibatkan upaya untuk mengatasi hambatan dan tekanan yang mungkin dihadapi karyawan dalam menjalankan hak politik mereka, serta menetapkan tanggung jawab dan sanksi yang jelas bagi pimpinan perusahaan yang mencoba menghalangi hak pilih karyawan. Dengan demikian, perlindungan hukum ini adalah pijakan penting untuk membangun lingkungan kerja yang demokratis, inklusif, dan menghargai hak asasi manusia setiap individu.

Hak pilih karyawan dalam pemilu merupakan aspek penting yang menyoroti partisipasi politik warga negara dalam konteks demokrasi. Sebagaimana diketahui, hak pilih karyawan bukan hanya sebuah hak asasi individu semata, melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak demokratis setiap warga negara. Dalam kerangka pemilu, karyawan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk memberikan suaranya dan ikut serta dalam menentukan arah politik negara. Hak ini tidak hanya mencerminkan keberagaman dan inklusivitas dalam sebuah negara demokratis, tetapi juga menjadi pengekspresian penting dari hak dasar setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses politik. Powell dalam mengatakan bahwa harus ada jaminan atas penerapan hak asasi manusia yang memungkinkan kebebasan berekspresi, serta keterlibatan aktif warga negara dalam proses pemilu dan pengambilan kebijakan di negara demokrasi. pemikirannya di muka umum dan melalui media, kebebasan warga negara untuk terlibat dalam organisasi sipil atau partai politik dijamin melalui keterlibatan aktif mereka dan penerapan hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam partai politik atau organisasi sosial dan menyuarakan gagasannya di depan

umum.

Hak pilih, yang mencakup kemampuan untuk memilih dan kemampuan untuk dipilih, adalah hak yang dimiliki warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Kemampuan untuk memberikan suara (hak pilih aktif) Kemampuan untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan umum dikenal dengan istilah hak pilih. Proses pengambilan keputusan pada saat pemilihan umum, seperti apakah akan memberikan suara atau tidak dalam pemilihan umum, dikenal dengan istilah partisipasi warga negara dalam pemilihan umum. Pemilu adalah sarana yang digunakan pemilih untuk menunjukkan kedaulatan politik suatu bangsa warga negara guna mengambil bagian dalam pemilihan umum. Hak pilih terdiri dari dua komponen diantaranya hak pilih aktif, yaitu kemampuan untuk memilih, dan hak pilih pasif, yaitu kemampuan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Kemampuan warga negara untuk dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum dikenal dengan istilah hak pilih. Selama pemilihan umum, warga negara terlibat dalam berbagai proses pengambilan keputusan, seperti memberikan suara atau tidak.

Pemahaman umum tentang pentingnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan menandakan landasan filosofis negara-negara yang mengakui peran aktif warganya dalam proses pengambilan keputusan politik. Demokrasi menjadi fondasi untuk mencapai pemerintahan yang adil, inklusif, dan transparan. Hak pilih, sebagai hak fundamental dalam demokrasi, menempatkan setiap warga negara sebagai pemegang suara yang memiliki peran krusial dalam menentukan masa depan politik negara. Pimpinan perusahaan memiliki peran signifikan dalam membentuk lingkungan kerja yang demokratis dan adil. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat dugaan bahwa pimpinan perusahaan dapat memengaruhi atau bahkan menghambat hak pilih karyawan. Dalam konteks ini, penelitian perlu menyorot tanggung jawab pimpinan perusahaan terhadap hak pilih karyawan. Apakah kebijakan internal perusahaan mendukung partisipasi dalam pemilu, ataukah ada bentuk intervensi yang dapat menghambat hak pilih karyawan? Pemahaman mengenai tanggung jawab ini penting untuk merancang regulasi yang efektif dalam melindungi hak pilih karyawan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, tidak dapat dihindari bahwa beberapa pimpinan perusahaan mungkin melanggar prinsip-prinsip demokrasi dengan membatasi atau mempengaruhi hak pilih karyawan. Oleh karena itu, perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas untuk mendorong kepatuhan pimpinan perusahaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang sanksi yang dapat diterapkan dan dampaknya terhadap perilaku pimpinan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman terhadap perlindungan hukum, tetapi juga menjelaskan konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

Tanggung jawab sosial karyawan untuk berpartisipasi dalam pemilu mencerminkan keterlibatan aktif individu di luar ruang kerja dalam pembentukan kebijakan negara. Pemahaman awal mengenai dampak hak pilih karyawan terhadap kebijakan perusahaan menyoroti keterkaitan antara hak politik karyawan dan tanggung jawab organisasi terhadap partisipasi karyawan dalam proses pemilu. Hak pilih karyawan bukan hanya hak individual, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung partisipasi demokratis karyawan dalam proses politik. Pasal 531 UU Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tentang larangan menghalang-halangi hak pilih. Menurut peraturan tersebut, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, menghalang-halangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya, terlibat dalam kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban selama proses pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara terancam hukuman maksimal dua tahun penjara dan denda maksimal 24 juta rupiah.

Pentingnya melindungi hak pilih karyawan dari potensi risiko atau tekanan yang mungkin berasal dari pimpinan perusahaan mencerminkan dinamika kompleks antara kepentingan bisnis dan partisipasi politik karyawan. Sambungan antara kepentingan bisnis dan partisipasi politik karyawan

dapat menimbulkan isu-isu etika yang menuntut pertimbangan mendalam, di mana keberlanjutan bisnis dapat bertentangan dengan hak demokratis individu. Potensi interferensi dari pimpinan perusahaan memberikan sorotan terhadap perlunya pemahaman dan pengelolaan konflik kepentingan untuk memastikan integritas proses pemilihan umum dan hak pilih karyawan tetap terlindungi. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan, yang menjadi inti dari analisis mendalam ini. Tujuan utama adalah menciptakan partisipasi politik yang bebas dan adil di kalangan karyawan, mengangkat hak pilih bukan hanya sebagai hak individual, tetapi juga sebagai bentuk hak asasi manusia karyawan.

Oleh karena itu, penelitian ini berkomitmen untuk menyelidiki kebutuhan mendesak akan perangkat hukum yang khusus melindungi hak pilih karyawan sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia, mengingat peran strategis partisipasi politik dalam membangun masyarakat yang demokratis. Penelitian juga dilakukan untuk mengeksplorasi peran pimpinan perusahaan dalam menjamin kebebasan dan keadilan hak pilih karyawan. Tanggung jawab pimpinan perusahaan bukan hanya terkait dengan keberlanjutan bisnis, tetapi juga dengan pembangunan demokrasi di dalam organisasi. Keterkaitan antara tanggung jawab pimpinan perusahaan dan citra perusahaan yang terkait dengan hak pilih karyawan menjadi fokus utama penelitian ini. Dengan memahami peran serta tanggung jawab pimpinan perusahaan terkait hak pilih karyawan, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pandangan yang holistik terhadap dinamika kompleks antara dunia bisnis dan kehidupan politik karyawan. Penelitian ini akan mendalami ragam sanksi yang dapat diterapkan pada pimpinan perusahaan terkait dengan pengaruhnya terhadap hak pilih karyawan. Analisis dampak sanksi terhadap reputasi dan keberlanjutan bisnis perusahaan menjadi fokus untuk memahami implikasi tindakan hukum terhadap aktor utama di dalam organisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sanksi dapat memengaruhi perilaku pimpinan perusahaan dan dampaknya pada lingkup bisnis. Penelitian akan menggali dampak pelanggaran hak pilih karyawan terhadap hubungan kerja dan lingkungan kerja secara menyeluruh. Hubungan antara stabilitas perusahaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokratis, termasuk hak pilih karyawan, akan diteliti untuk mengidentifikasi apakah pelanggaran hak tersebut dapat membahayakan stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Dengan memahami implikasi dari pelanggaran hak pilih karyawan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan yang lebih baik dan melindungi hak-hak karyawan dalam konteks demokrasi organisasional.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik preskriptif, yang berarti bahwa tujuannya adalah untuk memberikan panduan atau rekomendasi tentang bagaimana norma hukum dan prinsip hukum harus diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian hukum normatif juga mempertimbangkan asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku, yang mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam berbagai situasi hukum untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pilih Karyawan Dalam Pemilu**

Landasan filosofis perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, menempatkan kepentingan dan suara rakyat sebagai elemen sentral dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, hak pilih adalah instrumen yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam proses demokratis

tersebut. Landasan filosofisnya terletak pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang sama dalam mempengaruhi arah dan keputusan pemerintahan. Hak pilih karyawan di tempat kerja mencerminkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi ini di dalam organisasi, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama untuk menyuarakan preferensi politik mereka.

Selanjutnya, landasan filosofis perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan juga berkaitan dengan konsep hak asasi manusia. Hak politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, dianggap sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Hak asasi manusia menekankan bahwa setiap individu lahir dengan martabat dan hak yang sama, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi atau tekanan eksternal. Perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu adalah implementasi dari prinsip-prinsip ini, yang bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki akses yang setara dan tidak terhalang untuk menyuarakan pendapat mereka di tempat kerja.

Selain itu, landasan filosofis perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan juga dapat ditemukan dalam konsep keadilan dan kesetaraan. Prinsip-prinsip keadilan menuntut bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Dalam konteks hak pilih karyawan, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap suara dihargai dan dipertimbangkan dengan adil, tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak manajemen atau atasan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif, di mana keputusan politik tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu atau kekuatan hierarki. Dengan demikian, landasan filosofis perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu mencakup prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan. Perlindungan hukum ini bukan hanya mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis, tetapi juga menegaskan pentingnya menghormati hak-hak individu dalam setiap konteks, termasuk di tempat kerja. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang demokratis, inklusif, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar .

### **Landasan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pilih Karyawan Dalam Pemilu**

Landasan yuridis perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu merupakan fondasi yang diberikan oleh sistem hukum suatu negara untuk menjamin dan melindungi hak politik karyawan di lingkungan kerja. Secara umum, landasan yuridis ini merujuk pada serangkaian undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur hak pilih karyawan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Salah satu landasan utama dalam konteks ini adalah konstitusi suatu negara. Konstitusi umumnya menjamin hak politik warga negara, termasuk karyawan, dan menetapkan dasar hukum untuk perlindungan hak pilih mereka. Misalnya, dalam banyak konstitusi, terdapat ketentuan yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyuarakan suara mereka tanpa takut akan tekanan atau intimidasi. Selain konstitusi, landasan yuridis juga dapat ditemukan dalam undang-undang dan peraturan yang lebih spesifik mengenai hak pilih karyawan. Misalnya, beberapa negara mungkin memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur pemilu di lingkungan kerja, menetapkan hak-hak karyawan terkait pemilihan umum, serta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manajemen atau atasan. Keberadaan undang-undang ini memberikan kerangka kerja hukum yang jelas bagi perlindungan hak pilih karyawan dan memberikan dasar bagi penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Selain itu, landasan yuridis juga mencakup regulasi dan kebijakan internal perusahaan. Banyak perusahaan memiliki kebijakan internal yang mengatur hak politik karyawan dan menetapkan larangan terhadap tekanan atau intimidasi dalam proses pemilihan umum di tempat kerja. Kebijakan ini menciptakan landasan hukum tambahan yang menguatkan perlindungan hak pilih karyawan dan memberikan dasar untuk tindakan disipliner terhadap pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, landasan yuridis juga dapat ditemukan dalam putusan pengadilan atau kasus-kasus hukum terkait hak pilih karyawan. Putusan pengadilan sering kali menjadi preseden yang mengarah pada

pengembangan atau penegakan hukum yang lebih lanjut dalam hal perlindungan hak politik karyawan. Kasus-kasus ini membantu menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu dan memberikan interpretasi yang lebih jelas terhadap ketentuan hukum yang ada. Secara keseluruhan, landasan yuridis perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, kebijakan internal perusahaan, serta putusan pengadilan. Landasan ini memberikan kerangka kerja hukum yang penting untuk memastikan hak politik karyawan dihormati dan dilindungi secara efektif di lingkungan kerja .

### **Landasan Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pilih Karyawan Dalam Pemilu**

Landasan sosiologis perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu melibatkan pemahaman tentang interaksi antara individu, organisasi, dan masyarakat dalam konteks politik di lingkungan kerja. Secara sosiologis, perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan didasarkan pada pengakuan bahwa pemilihan umum di tempat kerja merupakan bagian integral dari dinamika sosial dan politik yang melibatkan berbagai aktor di dalam organisasi. Salah satu landasan utama dari perspektif sosiologis adalah penekanan pada pentingnya partisipasi politik sebagai sarana untuk membangun komunitas yang kuat dan berdampak positif pada dinamika organisasi. Pertama-tama, landasan sosiologis mempertimbangkan peran partisipasi politik dalam menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang kuat di antara karyawan terhadap organisasi mereka. Ketika karyawan merasa bahwa suara mereka dihargai dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dapat meningkatkan keterikatan mereka terhadap perusahaan dan mendorong keterlibatan aktif dalam upaya mencapai tujuan bersama. Perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan membantu menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihormati dan memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi arah organisasi. Selain itu, landasan sosiologis juga menyoroti pentingnya pengakuan terhadap keragaman pandangan politik di tempat kerja. Organisasi modern seringkali mencakup anggota dengan latar belakang, keyakinan, dan nilai yang beragam. Perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan membantu menghormati dan memfasilitasi ekspresi berbagai pandangan politik di dalam lingkungan kerja, yang pada gilirannya dapat memperkaya diskusi, mempromosikan pemikiran kritis, dan memperluas wawasan kolektif.

Selanjutnya, landasan sosiologis juga mengakui bahwa pemilihan umum di tempat kerja bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun hubungan sosial dan memperkuat komunitas. Partisipasi dalam proses pemilihan umum dapat menjadi ajang untuk memperluas jaringan sosial, mempererat hubungan antar-karyawan, dan membangun solidaritas di antara anggota organisasi. Perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan membantu menciptakan atmosfer di mana karyawan merasa aman dan didorong untuk terlibat dalam interaksi sosial yang konstruktif dan inklusif. Dengan demikian, landasan sosiologis perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu menekankan pentingnya partisipasi politik, pengakuan terhadap keragaman pandangan politik, dan pembangunan hubungan sosial di lingkungan kerja. Perlindungan ini tidak hanya membantu memastikan keadilan dan demokrasi di tempat kerja, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan komunitas yang kuat dan berdaya .

### **Konsep Rumusan Yang Ideal Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pilih Karyawan Dalam Pemilu**

Konsep rumusan yang ideal dalam perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam pemilu mengacu pada upaya menyeluruh untuk memastikan bahwa hak politik setiap individu dihormati dan dilindungi. Ini melibatkan penetapan hukum yang tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan terhadap tekanan atau intimidasi terhadap karyawan yang hendak menggunakan hak pilihnya. Selain itu, konsep ini juga mencakup inisiatif edukasi dan kesadaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang hak politik mereka serta pentingnya partisipasi dalam proses politik. Terakhir, perlindungan hukum harus disertai dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak politik karyawan, untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan menjaga

integritas proses pemilu. Dengan menerapkan konsep rumusan ini, diharapkan hak pilih karyawan dapat dilindungi secara optimal dan masyarakat dapat memastikan adanya representasi yang adil dan demokratis dalam pemilihan umum.

Hal ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam membangun budaya demokratis di tempat kerja. Melalui penghormatan dan perlindungan terhadap hak politik karyawan, perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi. Hak pilih adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan dengan memastikan bahwa hak ini dihormati dan dilindungi di tempat kerja, perusahaan menggarisbawahi pentingnya demokrasi sebagai prinsip yang mendasari tata kelola organisasi. Selanjutnya, melindungi hak politik karyawan juga merupakan langkah penting dalam memperkuat partisipasi aktif di dalam organisasi. Ketika karyawan merasa bahwa suara mereka dihargai dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih terlibat dan berkontribusi secara positif terhadap perkembangan perusahaan. Inisiatif untuk membangun budaya demokratis dapat mencakup pembentukan forum atau kelompok diskusi di mana karyawan dapat menyuarakan pandangan mereka tentang isu-isu tertentu, serta pembukaan ruang untuk menyampaikan ide-ide baru dan kreativitas.

Pengambilan keputusan bersama merupakan elemen kunci dari budaya demokratis di tempat kerja. Perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan memastikan bahwa setiap suara dianggap berharga dalam proses pengambilan keputusan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial karyawan. Dengan memfasilitasi diskusi terbuka dan partisipasi kolektif dalam pembuatan keputusan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan di mana ide-ide beragam dihargai dan dipertimbangkan secara adil. Membangun budaya demokratis di dalam organisasi juga mempromosikan rasa inklusivitas. Ketika karyawan merasa bahwa mereka memiliki akses yang setara ke proses pengambilan keputusan dan bahwa hak-hak mereka dihormati, hal ini menciptakan rasa keterlibatan dan kepemilikan terhadap keputusan yang dibuat oleh organisasi. Inklusivitas ini menciptakan lingkungan di mana semua anggota tim merasa dihargai dan didukung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas di tempat kerja. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan tidak hanya merupakan kewajiban etis, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam membangun budaya organisasi yang demokratis dan inklusif. Dengan memastikan bahwa setiap suara dihargai dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan karyawan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Ini tidak hanya menguntungkan individu karyawan, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan sebagai entitas yang menghargai keberagaman dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dalam segala aspek operasionalnya.

Memastikan keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilihan di tempat kerja adalah prinsip yang sangat penting dalam memastikan hak politik karyawan dihormati dan dilindungi dengan baik. Subbab ini menyoroti urgensi perlindungan hukum terhadap hak pilih karyawan dalam konteks keadilan dan kesetaraan, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi di lingkungan kerja. Keadilan dalam proses pemilihan umum berarti bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik di tempat kerja. Ini berarti bahwa tidak boleh ada hambatan atau diskriminasi yang menghalangi akses karyawan untuk memberikan suara atau terlibat dalam kegiatan politik lainnya. Ketidaksetaraan dalam akses atau peluang dapat merusak integritas proses politik dan merugikan hak politik individu.

Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa semua karyawan memiliki akses yang sama ke informasi tentang kandidat, platform politik, dan proses pemilihan umum secara keseluruhan. Kesetaraan dalam proses pemilihan umum menjamin bahwa suara setiap karyawan dihargai dan dipertimbangkan dengan adil, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Ini berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi atau preferensi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, suku, agama, atau status pekerjaan.

Perlindungan hukum harus menjamin bahwa semua karyawan diperlakukan dengan adil dan bahwa keputusan politik diambil berdasarkan pertimbangan merit dan kepentingan bersama.

Untuk memastikan bahwa proses demokratis di tempat kerja berlangsung dengan adil dan transparan. Subbab ini menyoroti pentingnya mencegah tekanan atau intimidasi yang mungkin dialami karyawan dari pihak manajemen atau atasan mereka. Ini bukan hanya masalah etis, tetapi juga esensial dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum di lingkungan kerja. Mencegah tekanan atau intimidasi memerlukan adanya ketentuan hukum yang jelas dan tegas. Perusahaan perlu memiliki kebijakan yang mengatur hak politik karyawan dan melarang segala bentuk intervensi atau tekanan terhadap keputusan politik individu. Kebijakan semacam itu harus disusun dengan jelas dan mudah diakses oleh semua karyawan, sehingga mereka tahu hak-hak mereka dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Penegakan ketat terhadap kebijakan semacam itu juga penting untuk menegaskan komitmen perusahaan terhadap keadilan dan demokrasi. Selain itu, upaya untuk mencegah tekanan atau intimidasi juga melibatkan pendidikan dan pelatihan kepada manajer dan atasan.

Mereka perlu diberi pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menghormati hak politik karyawan dan menjauhi segala bentuk campur tangan yang tidak pantas. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang batas-batas yang ada antara hubungan profesional dan politik di lingkungan kerja, serta strategi untuk mendukung partisipasi politik karyawan tanpa mengintimidasi mereka. Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa ada saluran komunikasi yang terbuka dan aman bagi karyawan untuk melaporkan segala bentuk tekanan atau intimidasi yang mereka alami. Perusahaan harus menegakkan kebijakan perlindungan whistleblowing yang melindungi karyawan yang melaporkan pelanggaran hak politik mereka dari tindakan balasan atau represif. Dengan menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman melaporkan pelanggaran, perusahaan dapat lebih efektif dalam mencegah tekanan atau intimidasi yang terjadi.

Transparansi dalam proses pemilihan umum juga dapat membantu mencegah tekanan atau intimidasi. Ketika proses pemilihan umum dijalankan secara terbuka dan transparan, mungkin lebih sulit bagi pihak manajemen atau atasan untuk melakukan campur tangan yang tidak sah. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa semua tahapan pemilihan umum, termasuk kampanye, debat, dan pemungutan suara, terbuka untuk semua karyawan dan dijalankan dengan integritas dan keadilan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, perusahaan dapat menciptakan lingkungan di mana setiap karyawan merasa aman dan terjamin untuk menjalankan hak politik mereka tanpa takut akan tekanan atau intimidasi dari pihak manajemen atau atasan. Hal ini akan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di tempat kerja dan meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap integritas dan keadilan organisasi.

## **KESIMPULAN**

Dari analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta implikasinya terhadap perlindungan hak politik karyawan dalam pemilu di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa negara menegaskan komitmennya untuk melindungi hak politik setiap individu, termasuk karyawan, sebagai bagian dari sistem demokrasi. Kedua undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas, menetapkan persyaratan dan batasan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara, termasuk hak untuk memilih dalam pemilu. Perlindungan hukum terhadap hak politik karyawan dijamin oleh negara, yang diwujudkan melalui ketentuan-ketentuan yang mengakui, melindungi, dan mengatur hak politik tersebut. Selain itu, sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran hak politik menunjukkan seriusnya negara dalam menjaga integritas proses pemilu dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks perlindungan hak politik karyawan dalam pemilu, pengecualian terhadap anggota TNI dan Polri menunjukkan bahwa tidak semua warga negara memiliki hak yang sama

dalam menggunakan hak politik mereka. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi pentingnya memastikan bahwa karyawan yang bukan anggota TNI atau Polri memiliki akses yang setara dan tidak terhalang dalam menggunakan hak memilih mereka. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar sebagai pemilih dan memberikan suara mereka tanpa takut akan diskriminasi atau tekanan eksternal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agusta, R. (2023, Maret 8). Perintah Undang-Undang, Bawaslu Tegaskan Hak Pilih Pekerja Tidak Boleh Dihalangi. Retrieved from BAWASLU: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/perintah-undang-undang-bawaslu-tegaskan-hak-pilih-pekerja-tidak-boleh-dihalangi>
- Cibro, C. J. (2022). Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 191-197.
- Efyanti, Y. (2019). Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*.
- Fahmi, K. (2017). Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 757-777.
- Indonesia, P. P. (2003, Maret 25). Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Retrieved from DATABASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013>
- Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Indonesia: Kencana.
- Kansil, C. S. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Indonesia: Balai Pustaka.
- Mamudji, S. S. (1985). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: CV. Rajawali.
- RI, S. K. (2017, Agustus 22). Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2). Retrieved from Sekretariat Kabinet RI: <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%207%20Tahun%202017%20ini%20menyebutkan%2C%20Warga%20Negara,pernah%20kawin%20mempunyai%20hak%20memilih.>
- Soeprapto, M. F. (2007). Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius.
- Surbakti, & Ramlan. (2007). Memahami Ilmu Politik. Indonesia: PT. Grasindo.
- Surbakti, R. S. (2011). Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar. Indonesia: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Utami, A. P. (2024). Peran Audit internal atas kualitas Pemeriksaan Laporan keuangan yang dilakukan oleh audit eksternal pada sebuah perusahaan. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 54-63.
- Warouw, C. C. (2022). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Privatum*.